



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PROF. DR. H. AWANG FAROEK ISHAK GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
BAB 1 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN.....	1
1.1 Ketimpangan di Indonesia.....	2
1.2 Membangun Indonesia dari Pinggiran.....	5
1.3 Mengapa Kalimantan?.....	6
1.4 Fokus Buku Ini.....	7
1.5 Sistematika Isi Buku.....	10
BAB 2 MENGAPA KALIMANTAN PERLU DIPERCEPAT PEMBANGUNANNYA?.....	13
2.1 Sumbangan Kalimantan dalam Ekonomi Indonesia.....	13
2.2 Kondisi Perekonomian Wilayah Kalimantan.....	19
2.3 Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan.....	30
2.4 Analisis Faktor.....	33

	2.5 Perkembangan Kondisi Kawasan Andalan dan Kinerja Kapet di Pulau Kalimantan	38
BAB 3	PUSAT PERTUMBUHAN, KETIMPANGAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN DI INDONESIA.....	43
	3.1 Pembangunan dan Ketimpangan di Indonesia	43
	3.2 Seberapa Jauh Relevansi Hipotesis Kuznets?	57
	3.2.1 Uji Hipotesis Kuznets di Indonesia	59
	3.3 Pengembangan Kawasan dan Pusat Pertumbuhan	61
	di Indonesia	61
BAB 4	ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PULAU KALIMANTAN.....	67
	4.1 Metode Mengidentifikasi Sektor Unggulan	67
	4.2 Sektor Ekonomi Unggulan di Tiap Provinsi	69
	4.3 Analisis Kluster Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan ..	76
	4.4 Prioritas Pembangunan di Tiap-tiap Kluster	84
BAB 5	DI MANA LOKASI KUTUB PERTUMBUHAN DI PULAU KALIMANTAN?	89
	5.1 Teori Kutub Pertumbuhan	89
	5.2 Kutub Pertumbuhan di Kalimantan.....	93
	5.3 Tipologi Provinsi berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita	94
	5.4 Pemetaan Kluster Kabupaten/Kota	108
BAB 6	KETIMPANGAN ANTARDAERAH DI PULAU KALIMANTAN	111
	6.1 Pengukuran Ketimpangan di Kalimantan	111
	6.2 Tren Ketimpangan Daerah di Masing-masing Provinsi...	114
	6.3 Uji Hipotesis Kusnetz di Kalimantan	123
BAB 7	STRATEGI KALIMANTAN SEJAHTERA.....	129
	7.1 Mengurangi Kemiskinan.....	137
	7.1.1 Kluster Pertama: Pemberian Bantuan dan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga	140
	7.1.2 Kluster Kedua: Pemberdayaan Masyarakat.....	143
	7.1.3 Kluster Ketiga: Pemberdayaan Usaha Mikro,	

	Kecil, dan Menengah (UMKM).....	145
7.1.4	Kluster Keempat: Program Rumah Murah untuk Rakyat	147
7.1.5	Strategi Penanggulangan Kemiskinan (<i>Pro-Poor</i>) Kalimantan.....	149
7.2	Meningkatkan Daya Saing	151
7.2.1	Agroindustri	153
7.2.2	Pariwisata.....	154
7.2.3	Pertambangan Berkelanjutan	160
7.3	Sumber Daya Manusia	165
7.3.4	Kesehatan.....	167
7.3.5	Pendidikan	168
7.4	Infrastruktur.....	169
7.4.1	Infrastruktur Air	170
7.4.2	Mengatasi Krisis Listrik dan Akselerasi Infrastruktur	170
7.5	Interkonektivitas.....	175
BAB 8	STRATEGI KALIMANTAN AMAN	179
8.1	Menjaga Kedaulatan Negara dan Keutuhan NKRI di Wilayah Perbatasan.....	180
8.1.1	Kemiskinan Daerah Perbatasan	181
8.1.2	Infrastruktur Daerah Perbatasan	182
8.1.3	Strategi Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI	183
8.1.4	Aksesibilitas dan Interkonektivitas	183
8.1.5	Infrastruktur Daerah Perbatasan	184
8.2	Membangun Daerah Perbatasan yang Aman	187
8.2.1	Strategi Sabuk Komando	188
8.2.2	Memberantas Transaksi dan Bisnis Ilegal.....	189
BAB 9	STRATEGI KALIMANTAN DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH.....	193
9.1	Kinerja Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah	194
9.2	Tata Kelola (<i>Governance</i>) Pemerintah Daerah	195
9.3	Inovasi Pemda	197
9.4	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel	199

9.5	Menjadi Pelayan Masyarakat dalam Pelayanan Publik ...	205
9.6	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Perizinan, dan Kependudukan yang Bebas Suap dan Gratifikasi	206
BAB 10	STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN	209
10.1	Strategi Pembangunan Berkelanjutan	210
10.2	Strategi Pengembangan Berbasis Wilayah.....	215
10.3	Perlunya Pengembangan Ekonomi Lokal	220
10.3.1	Pendekatan Sektoral.....	221
10.3.2	Pendekatan Spasial	224
10.3.3	Pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM).....	229
10.4	Program Aksi.....	235
INDEKS	257



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase pertumbuhan PDRB di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, 2006–2012 (ADHK 2000 = 100)	4
Tabel 1.2	Peranan wilayah/pulau dalam pembentukan PDB nasional, 2012–2015 (persen).....	7
Tabel 2.1	Pangsa masing-masing provinsi terhadap ekonomi nasional 16	
Tabel 2.2	Peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB nasional, 1978–2012 (dalam %).....	21
Tabel 2.3	Realisasi investasi PMA 2010–2012 (nilai investasi dalam US\$).....	22
Tabel 2.4	Realisasi investasi PMDN 2010–2012 (nilai investasi dalam US\$).....	22
Tabel 2.5	Perbandingan kontribusi provinsi terhadap pembentukan PDRB ADHK migas Pulau Kalimantan, 2004 dan 2012	23
Tabel 2.6	PDRB menurut provinsi di Pulau Kalimantan, 2009–2012 (dalam Miliar Rupiah, ADHK).....	23
Tabel 2.7	Perbandingan distribusi persentase PDRB ADHK Pulau Kalimantan berdasarkan lapangan usaha, 2000–2012 (dalam %).....	26
Tabel 2.8	PDRB perkapita ADHK tertinggi dan terendah di Pulau Kalimantan (menurut urutan 3 kabupaten/kota), 2008 dan 2012	27
Tabel 2.9	Perkembangan indikator sosial ekonomi kabupaten/kota di Pulau Kalimantan, 2008–2012.....	32

Tabel 2.10	Hasil uji KMO dan Bartlett's Test	34
Tabel 2.11	Nilai communalities (peranan variabel)	35
Tabel 2.12	Analisis komponen utama, nilai <i>eigenvalue</i> , dan total varians kumulatif	36
Tabel 2.13	Hasil komponen analisis utama	37
Tabel 2.14	Sistem perkotaan nasional di Pulau Kalimantan	39
Tabel 2.15	Sebaran kabupaten/kota dalam wilayah KAPET di Pulau Kalimantan	40
Tabel 2.16	Daftar kawasan andalan di Pulau Kalimantan	41
Tabel 3.1	Studi Empiris tentang Ketimpangan Ekonomi Antardaerah	45
Tabel 3.2	<i>Unbalanced Growth</i> Antargolongan Pendapatan	51
Tabel 3.3	Peranan wilayah/pulau dalam pembentukan PDB nasional, 2012–2015 (%)	53
Tabel 3.4	Produk Domestik Regional Bruto perkapita 2010–2014 atas harga konstan 2010 (ribu rupiah)	53
Tabel 3.5	Estimasi Hubungan antara Indeks Gini dengan logaritma PDRB perkapita di Indonesia 1994–2012	59
Tabel 3.6	Ringkasan Hasil Penelitian tentang Validitas Hipotesis Kuznets	61
Tabel 4.1	Klasifikasi sektor berdasarkan gabungan nilai SLQ dan DLQ	69
Tabel 4.2	Perbandingan Kontribusi PDRB Nonmigas Berdasarkan Lapangan Usaha Per Provinsi, 2008–2012 (dalam %) atas dasar Harga Konstan	70
Tabel 4.3	Sektor Basis Pulau Kalimantan Berdasarkan Hasil Analisis LQ, 2000–2012	71
Tabel 4.4	Klasifikasi Sektor Usaha Nonmigas Pulau Kalimantan Berdasarkan Nilai SLQ, DLQ, dan MRP, 2000–2012	72
Tabel 4.5	Pusat-pusat klaster di Pulau Kalimantan, 2012	77
Tabel 4.6	Kabupaten/kota dalam klaster Agraris	78
Tabel 4.7	Kabupaten/kota dalam klaster Perkotaan	80
Tabel 4.8	Kabupaten/kota dalam klaster Tertinggal	82
Tabel 4.9	Kabupaten/kota Tertinggal Menurut KPDT, (2013)	83
Tabel 4.10	Kabupaten/kota dalam klaster Kaya	84
Tabel 5.1	Klasifikasi wilayah berdasarkan PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi	94

Tabel 5.2	Klasifikasi kabupaten/kota menurut tipologi kabupaten/kota, 2000–2012.....	96
Tabel 5.3	Klasifikasi kabupaten/kota berdasarkan nilai <i>Moran Scatterplot</i> PDRB perkapita, 2000–2012.....	103
Tabel 6.1	Nilai Indeks Williamson dan Entropi Theil antarkabupaten/kota, 2000–2012.....	114
Tabel 6.2	Nilai Indeks Williamson menurut provinsi, 2000–2012.....	116
Tabel 6.3	Indeks Entropi Theil, Entropi Theil <i>between group</i> , Entropi Theil <i>within group</i> Pulau Kalimantan (sektor nonmigas), 2000–2012.....	118
Tabel 6.4	Rata-rata Indeks Entropi Theil antarkabupaten/kota, 2000–2012.....	123
Tabel 6.5	Nilai R^2 dan F antara PDRB perkapita dengan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil, 2000–2012.....	123
Tabel 6.6	Ringkasan hasil analisis uji validitas hipotesis Kuznets.....	125
Tabel 6.7	Nilai korelasi antara Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil Pulau Kalimantan, 2000–2012.....	126
Tabel 6.8	Hasil perhitungan uji t.....	127
Tabel 7.1	Tahapan Penyusunan Perencanaan Daerah Kalimantan 2030.....	129
Tabel 7.2	Visi dan Misi Tiap Provinsi di Kalimantan.....	131
Tabel 7.3	Jumlah Penduduk Miskin per Provinsi di Indonesia, Tahun 2013 (dalam ribuan jiwa).....	138
Tabel 7.3	Jumlah Penduduk Miskin per Provinsi di Indonesia, Tahun 2013 (dalam ribuan jiwa) (lanjutan).....	139
Tabel 7.4	Jenis Biaya Pendidikan Menurut PP No. 48 Tahun 2008.....	142
Tabel 7.5	Dana Bantuan Operasional Sekolah, 2008–2012.....	143
Tabel 7.6	Total Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 2011–2012.....	143
Tabel 7.7	Realisasi KUR Menurut Sektor Ekonomi.....	146
Tabel 7.8	Rencana Pembangunan Rumah Murah dan Rumah Sangat Murah.....	148
Tabel 7.9	Batasan Harga Rumah Maksimum dan Suku Bunga per Tahun.....	149
Tabel 7.10	Definisi UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008.....	157
Tabel 7.11	Enam Program Aksi Pengembangan UMKM.....	158

Tabel 7.12	Strategi Jangka Panjang Pembangunan Bidang-bidang Utama Terkait REDD+ di Kalimantan Timur	162
Tabel 7.13	Indeks Pembangunan Manusia per Provinsi di Indonesia, 2010-2015.....	165
Tabel 8.1	Tingkat Kemiskinan di Kalimantan (%), 2013-2016	182
Tabel 9.1	Jenis Inovasi	199
Tabel 9.2	Istilah pada Opini Laporan Keuangan.....	200
Tabel 9.3	Opini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 2009-2015.....	201
Tabel 9.4	Opini LKKL/BUN, Tahun 2009-2015	202
Tabel 9.5	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten di Indonesia, Tahun 2009-2014	203
Tabel 10.1	Luas Lahan Kritis di Kaltim, 2012.....	213
Tabel 10.2	Kondisi Hutan Mangrove di Kaltim Tahun 2012.....	213
Tabel 10.3	Keterkaitan Bidang Penurunan Emisi GRK pada RAN dengan Pembagian Urusan Pemerintahan	215
Tabel 10.4	Peningkatan Kerja Sama Antardaerah Berdasarkan Keunggulan Komparatif.....	226
Tabel 10.5	Strategi dan Upaya Penyelesaian di Koridor Ekonomi Kalimantan	239



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Tahun 2016 (persen)	vi
Gambar 1.1	Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan rasio Gini di Indonesia 2002–2014	2
Gambar 1.2	Pola spasial kemiskinan di Indonesia tahun 2014.....	5
Gambar 1.3	Peta lokasi daerah tertinggal dan nontertinggal di Indonesia tahun 2015	6
Gambar 2.1	Peta daya saing posisi strategis wilayah Pulau Kalimantan di koridor nasional, regional, dan global.....	18
Gambar 2.2	Perencanaan pembangunan koridor ekonomi Kalimantan.....	19
Gambar 2.3	Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan dan 33 provinsi di Indonesia, 2001–2012.....	20
Gambar 2.4	Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut provinsi di Pulau Kalimantan, 2008–2012	24
Gambar 2.5	Rata-rata PDRB perkapita ADHK 2000 33 provinsi di Indonesia, 2004–2012 (dalam rupiah)	27
Gambar 2.6	Perbandingan beberapa indikator sosial ekonomi provinsi di wilayah Kalimantan, 2012 (dalam %)... ..	31
Gambar 2.7	Matriks komponen rotasi.....	38
Gambar 3.1	Perkembangan Entropi di Indonesia tahun 2001–2010 ...	55
Gambar 3.2	Perkembangan Entropi Antarpulau di Indonesia tahun 2001–2010.....	56
Gambar 3.3	Perkembangan Entropi dalam Pulau di Indonesia tahun 2001–2010.....	56

Gambar 3.4	Hubungan Indeks Gini terhadap log PDRB perkapita di Indonesia 1994–2012	60
Gambar 3.5	Perencanaan Pembangunan di Enam Koridor Ekonomi melalui Program MP3EI	63
Gambar 5.1	Tipologi kabupaten/kota di Pulau Kalimantan menurut PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi nonmigas, 2000–2012.....	95
Gambar 5.2	Peta klasifikasi kabupaten/kota berdasarkan PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi nonmigas, 2000–2012.....	98
Gambar 5.3	Pola spasial PDRB perkapita menurut kabupaten/kota, 2000–2012.....	101
Gambar 5.4	Scatter <i>Plot Moran's I</i> PDRB perkapita kabupaten/kota, 2000–2012.....	102
Gambar 5.5	<i>LISA Cluster Map</i> PDRB perkapita kabupaten/kota, 2000–2012.....	104
Gambar 5.6	Peta sebaran daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan pusat kegiatan nasional wilayah Kalimantan	106
Gambar 5.7	<i>G* Cluster Map</i> PDRB perkapita kabupaten/kota, 2000–2012.....	107
Gambar 5.8	Pemetaan klaster kabupaten/kota di Pulau Kalimantan, 2000–2012.....	109
Gambar 6.1	Nilai Indeks Williamson Pulau Kalimantan dan Trend, 2000–2012.....	115
Gambar 6.2	Nilai Indeks Entropi Theil Pulau Kalimantan dan Trend, 2000–2012.....	117
Gambar 6.3	Nilai Indeks Entropi Theil <i>between group</i> Pulau Kalimantan dan Trend, 2000–2012.....	117
Gambar 6.4	Nilai Indeks Entropi Theil <i>within group</i> Pulau Kalimantan dan Trend, 2000–2012	119
Gambar 6.5	Nilai Entropi Theil <i>within group</i> Provinsi Kalimantan Barat dan Trend, 2000–2012.....	120
Gambar 6.6	Nilai Entropi Theil <i>within group</i> Provinsi Kalimantan Selatan dan Trend, 2000–2012.....	120
Gambar 6.7	Nilai Entropi Theil <i>within group</i> Provinsi Kalimantan Tengah dan Trend, 2000–2012.....	121

Gambar 6.8	Nilai Entropi Theil <i>within group</i> Provinsi Kalimantan Timur dan Trend, 2000–2012.....	122
Gambar 6.9	Kurva hubungan antara Indeks Williamson dan PDRB Perkapita nonmigas, 2000–2012.....	124
Gambar 7.1	Tiga Pilar Misi Kalimantan 2030.....	130
Gambar 7.2	Strategi Kalimantan Sejahtera 2030.....	137
Gambar 7.3	Empat Kluster Strategi Antikemiskinan.....	139
Gambar 7.4	Penyaluran KUR Menurut Pulau, 2010.....	147
Gambar 7.5.	Perkembangan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan per Kluster (Miliar).....	149
Gambar 7.6	Strategi Penanggulangan Kemiskinan (<i>Pro-Poor</i>).....	150
Gambar 7.7	Program Penanggulangan Kemiskinan Kalimantan.....	151
Gambar 7.8	Piramida Daya Saing Daerah.....	152
Gambar 7.9	Sistematika Pembangunan Agroindustri Kalimantan.....	154
Gambar 7.10	Daerah Terpencil di Kalimantan Selatan muncul dalam website www.indonesia.travel.id	155
Gambar 7.11	Pengembangan Pariwisata Berbasis Usaha Kecil.....	156
Gambar 7.12	Grafik IPM per Provinsi Kalimantan, 2010-2015.....	166
Gambar 7.13.	Alur Strategi dalam Peningkatan SDM Kalimantan.....	167
Gambar 7.14	Alur Strategi dalam Peningkatan Kesehatan.....	168
Gambar 7.15	Strategi Menuju Kalimantan Berpendidikan.....	169
Gambar 7.16	Strategi untuk Pemasangan Infrastruktur Air dan Listrik Kalimantan.....	169
Gambar 7.18	Pembangkit Listrik Berbasis Gas.....	174
Gambar 7.19	Jalur Koneksi Daerah dan Indonesia Menuju Dunia.....	176
Gambar 8.1	Strategi Kalimantan Aman 2030.....	181
Gambar 8.2	Permasalahan Perbatasan Antara Indonesia dengan Malaysia.....	183
Gambar 8.3	Pembangunan Konektivitas Antardaerah Perbatasan.....	184
Gambar 8.4	Perbatasan Kaltara dan Kaltim dengan Malaysia.....	185
Gambar 8.5	Lokasi 10 Kawasan Perbatasan dan Sebaran 26 Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Perbatasan.....	188
Gambar 8.6	Strategi Pembangunan Sabuk Komando.....	189
Gambar 8.7	Bisnis Ilegal.....	190

Gambar 8.8	Pihak-Pihak yang Berperan dalam Pemberantasan Transaksi dan Bisnis Ilegal.....	190
Gambar 9.1	Pertimbangan Pelayanan menurut Aparat Birokrasi	195
Gambar 9.2	Hambatan yang Dirasakan Pelaku Bisnis (%)	196
Gambar 9.3	Hambatan Arus Barang Ekspor Indonesia	197
Gambar 9.4	Perbandingan Biaya Ekstra yang Harus Dibayar Perusahaan Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	198
Gambar 9.5	Strategi Memperbaiki Akuntabilitas Laporan Keuangan di Kalimantan	205
Gambar 9.6	Pemetaan Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Kalimantan	208
Gambar 10.1	Tiga Tahapan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	209
Gambar 10.2	Pendekatan Rencana Aksi untuk Kalimantan Bangkit 2030.....	221
Gambar 10.3	Pendekatan Revitalisasi Pertanian	222
Gambar 10.4	Proyeksi Masa Depan Ekonomi Kalimantan Tanpa dan Dengan Percepatan Pembangunan Agribisnis.....	223
Gambar 10.5	Strategi Pengembangan Berdimensi Spasial	224
Gambar 10.6	Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Wilayah.....	225
Gambar 10.7	Keterkaitan Kebijakan, Strategi, Program, Tujuan, serta Sasaran	228
Gambar 10.8	Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM.....	229